

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini akan mendiskusikan tentang analisis kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan tahun 2019. Pengelolaan Pasar Seni Gabusan menjadi fokus studi ini dengan melihat bahwa ada beberapa kendala atau bisa disebut kegagalan dalam pengelolaan. Disebut gagal dikarenakan harapan di awal pembangunan Pasar Seni Gabusan dapat menjadi sentral industri perdagangan kerajinan di Kabupaten Bantul dan menjadi sarana bagi pengembangan industri UMKM menjadi jauh dari harapan tersebut. Indikator kegagalan ini dapat dilihat dari tidak stabilnya jumlah pengunjung atau calon pembeli terlihat rame hanya ketika ada event saja, menurunnya jumlah pengrajin/penjual yang menempati kios yang disediakan, beberapa fasilitas penunjang yang terlihat tidak terawat, dan omzet yang tidak terpenuhi. Berikut ini data pengunjung dan omzet Pasar seni Gabusan tahun 2016-2017:

Tabel 1.1 Tabel Data Pengunjung dan Omzet Pasar Seni Gabusan Tahun 2016-2017

Bulan	2016	2017
-------	------	------

	Pengunjung	Omzet (dalam RP)	Pengunjung	Omzet (dalam RP)
Januari	4.136	64.575	2.391	69.198
Februari	6.274	77.135	4.448	70.575
Maret	4.452	65.491	39.609	69,974
April	4.750	46.675	11.471	67.845
Mei	6.898	93.593	11.987	66.541
Juni	3.466	111.385	12.105	68.161
Juli	5.937	104.307	48.872	109.023
Agustus	152.516	88.383	89.675	139.000
September	3.158	96.495	15.112	125.705
Oktober	11.040	109.735	15.484	137.069
November	14.326	86.792	0	0
Desember	10.423	123.605	0	0
Total	227.376	1.068.172	251.154	923.094

Sumber :Riyanti& Kumoro (2018, Hal : 623).

Berbicara tentang UMKM sudah menjadi realitas bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup banyak masyarakat sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM

menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian(keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana (Danuar, 2013:1).

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Menurut data dari www.modalrakyat.id sektor ini berhasil menghidupi 58,97 juta orang di Indonesia. Sumbangan sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pun cukup signifikan. Data dari www.cnnindonesia.com menunjukkan kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Secara kuantitas, jumlah UMKM di Indonesia semakin banyak dari waktu ke waktu, pada 2017 terdapat 62.928.077 jenis usaha, meningkat 2.06% dari tahun 2016 yang berjumlah 61.656.547. Jumlah ini terdiri dari 98,70% usaha mikro, 1.20% usaha kecil, 0.09% usaha menengah dan hanya 0.01% yang masuk kategori usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM menjadi salah satu tumpuan dari perekonomian nasional walaupun di dominasi oleh usaha mikro yang menjadi sumber pendapatan masyarakat menengah kebawah.

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu daerah yang mempunyai potensi UMKM yang besar. Menurut www.ekonomi.bisnis.com di daerah ini industri kerajinan menjadi penopang

pendapatan daerah yang cukup besar karena mampu memasarkan kerajinannya dari pasar domestik hingga pasar internasional, total industri kreatif sampai akhir 2016 secara unit sekitar 7.000-an industri, dari jumlah itu yang produknya sudah orientasi ekspor 50% lebih. Berbagai macam sentra industri di kawasan ini antara lain industri kimia, logam mesin, industri hasil pertanian dan kehutanan. Aneka industri ini lebih banyak berupa barang kerajinan, seperti gerabah, mebel dan aneka kerajinan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat hingga akhir tahun 2016, keberadaan industri mikro, kecil, dan menengah di daerahnya mampu menyerap sebanyak 95.164 tenaga kerja dari total sebanyak 21.567 industri mikro kecil yang ada di Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan sistem dan hukum nasional di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya membina dan membangun fasilitas yang berorientasi pada masyarakat kecil pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang berfokus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar dapat meningkatkan kualitas dan hasil produksi. Terlihat pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bantul membangun salah satu sentral promosi dan penjualan hasil produksi kerajinan yaitu Pasar Seni Gabusan (PSG) yang dalam perkembangannya belum mampu berkembang secara optimal.

Pendirian Pasar Seni Gabusan (PSG) berawal dari permintaan para pengrajin industri kecil yang menginginkan hasil produksinya di beri fasilitas pemasaran yang terintegrasi sehingga dapat memudahkan adanya transaksi jual beli dari para pedagang dan pembeli kemudian direspon dan direalisasikan oleh Bupati Kabupaten Bantul pada Desember 2003. Dengan dibangunnya PSG diharapkan industri kerajinan kerajinan di Kabupaten Bantul semakin berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. PSG dibangun di atas tanah seluas 4,5 hektare ini dengan menawarkan konsep belanja yang menarik. Dana yang di gelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pembangunan Pasar Seni Gabusan sebesar 7.495.000.000. Akses utama jalan menuju Pasar Seni Gabusan (PSG) terletak pada Jalan Parangtritis km 9.5 Timbulharjo, Sewon, Bantul (Christina & Kusmarianto, 2017:3).

Selain menyediakan tempat parkir yang sangat luas, PSG juga memiliki sektor-sektor belanja yang sebenarnya tertata dengan baik. Gabusan dirancang untuk membuka akses pengrajin ke pasar internasional. Karenanya, tak seperti pasar lain, desain pasar yang menampung sekitar 444 pengrajin ini juga bertaraf internasional. Perancangan bangunan pasar ini tak hanya melibatkan arsitek dalam negeri saja, tetapi juga mancanegara, tentu dengan menonjolkan arsitektur lokal. Terbagi dalam 16 los, Gabusan menjual kerajinan dari ragam bahan dasar perbelanjaan logam, perak, batik, dan kerajinan tangan lainnya dikelompokkan secara rapih. Harapannya, pembangunan PSG dapat mengakomodir seluruh pengusaha pengrajin yang

ada di Bantul sehingga dalam fungsinya dapat mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan yang dihasilkan (www.bantulkab.go.id).

Namun harapan tersebut pelan-pelan seiring berjalannya waktu menjadi sirna dan menjadi tidak optimal dapat dilihat dari beberapa faktor. Seperti kondisi banyak kios penjual yang tidak lagi ditempati atau dioperasikan. Pendapatan yang jauh dari harapan menyebabkan banyak dari penjual kerajinan memilih untuk tidak lagi berjualan. Hanya ada beberapa kios yang masih menempati di tiap-tiap los, padahal dari awal pengoprasian pasar tersebut terdapat 300 kios yang menempati dan berjualan di kios-kios yang ada dan sekarang hanya mencapai 79 kios yang ada. Pemilik kios seolah-olah dengan mudahnya pergi dan kembali karena tidak adanya kontrak dengan pengelola pasar. Beberapa penjual yang masih setia menempati kios yang ada berharap pengelola lebih mempromosikan Pasar Seni Gabusan yang awalnya diharapkan dapat menjadi sentral penjualan kerajinan di Kabupaten Bantul(Riyanti & Kumoro, 2018: 624) .

PSG memang tidak seperti pasar-pasar pada umumnya. Hal itu disebabkan barang-barang yang diperjual belikan di PSG adalah barang-barang sekunder bahkan tergolong barang-barang tersier. Dengan demikian sasaran konsumennya adalah wisatawan kelas menengah ke atas atau orang-orang lokal yang menggemari dan mengoleksi barang-barang kerajinan. Karakter pasar yang unik seperti inilah yang belum mampu dipahami secara menyeluruh oleh pengelola PSG, sehingga dari segi jumlah pengunjung yang terus menurun karena tidak adanya inovasi untuk menarik pengunjung

datang ke PSG secara berkelanjutan. Menurunnya jumlah pengunjung atau calon pembeli, hal ini dapat dilihat secara empiris bagaimana kegiatan di Pasar Seni Gabusan (PSG). Keramaian pengunjung terlihat ketika adanya hari libur lebaran, libur nasional dan ada event saja yang diadakan di PSG. Keramaian pengunjung itupun tidak menjamin adanya peningkatan transaksi jual beli. Fakta tersebut menunjukkan Pasar Seni Gabusan sebagai sentral kerajinan di Kabupaten Bantul belum berjalan secara optimal (Ainun, 2014:8).

Pengelolaan PSG menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengatur segala tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kinerjanya dalam membantu Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan perindustrian dan perdagangan disektor formal maupun informal. PSG yang secara teknis dikelola oleh Manajemen PSG yang berada dibawah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul harus lebih memerhatikan dan membuat program baru yang dapat menghidupkan kembali PSG sesuai yang diharapkan.

PSG juga mempunyai masalah lain tentang status lahan pembangunan. Dari total 4,5 hektar lahan PSG, sebagian besar adalah lahan berstatus tanah pelungguh dan sebagian kecilnya berstatus sebagai tanah kas desa. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bantul masih menyewa

lahan tersebut dalam waktu selama 20 tahun. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bantul berencana menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk membebaskan lahan PSG akan tetapi hingga saat ini masalah tersebut belum diatasi dengan baik(Christina & Kusmarianto, 2017:3).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terkhusus Dinas Perdagangan untuk meningkatkan omset para pengrajin di PSG dan kunjungan hingga saat ini masih belum dapat tercapai. Sampai saat ini kondisi PSG masih terus sepi pengunjung, sehingga apa yang menjadi tujuan awal Pemerintah Kabupaten Bantul dengan membangun PSG ini sebagai tempat untuk memfasilitasi para pengrajin belum dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Pasar Seni Gabusan Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini berupa:

1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis akan tetapi kepada masyarakat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi kajian teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih mengenai kinerja Dinas Perdagangan dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan terkait kinerja Dinas Perdagangan dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian atau informasi ataupun referensi bagi masyarakat umum terkait kinerja Dinas Perdagangan dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.

1.5 Studi Terdahulu

Tabel 1. 2 Tabel Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Analisis
1.	Dwi Riyanti, Joko Kumoro	2018	Pelaksanaan Humas di Pasar Seni Gabusan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan humas di Pasar Seni Gabusan adalah (1) terikat dengan peraturan pemerintah yang cenderung kaku (2) pengelolaan media yang kurang maksimal 3) tidak adanya sumber dana kegiatan.
2.	Adhe Filima Fadirianto, Muhammad Soe'oeud Hakam	2018	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)	Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang yaitu pada kegiatan pelatihan, promosi, dan monitoring. Kurangnya antusias peserta pelatihan, motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang.
3.	Ikhda Isri Layali	2017	Strategi Pemberdayaan Pedagang Pasar oleh Dinas Pengelola Pasar Manis Purwokerto	Hasil penelitian ini tentang strategi pemberdayaan pedagang yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar Manis Purwokerto mencakup 5 indikator : 1. Pemungkinan 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Penyokong 5. Pemeliharaan
4.	Humam Mujahidin Ar Rosyidi	2016	Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam Rangka	Revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan optimal, dengan adanya Peningkatan pengelolaan dan fasilitas. Seperti penambahan jumlah pekerja, peningkatan keamanan

			Meningkatkan Kualitas Pelayanan	dan kebersihan, pembuatan area parkir, dan ruang terbuka.
5.	Ni Made Vera Pamesti, I Gusti Ayu Ketut Gantari	2016	Peran Orientasi Pasar Memediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Industri Kerajinan Endek	Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap orientasi pasar dan kinerja UKM. Orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja UKM dan mampu memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UKM di Kabupaten Klungkung.
6.	Ilma Ameliana Putri	2016	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Daya Saing Sentra Industri Kerajinan Kulit di Jalan Sawo Kabupaten Magetan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan membuat rencana strategis untuk mengatasi dan merespon masalah daya saing industri kerajinan kulit di Jalan Sawo. Dalam perjalanannya rencana strategis yang dibuat mengalami beberapa kendala yaitu terbatasnya dana untuk pembinaan dan pengembangan SDM menjadi tidak merata, kurangnya tenaga penyuluh sehingga sebagian pengrajin informasi yang diberikan hanya diterima oleh Ketua Sentra di Jalan Sawo dan belum adanya fasilitas seperti balai pelatihan kerja sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada para pengrajin

7.	Bagus Suryolaksono	2015	Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya membuat program pembinaan terhadap 329 UKM dan 15 Sentra Kampung Unggulan dan Handycraft, memberikan alat produksi seperti mesin penjahit, promosi pasar ke website Disperindag dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan Handycraft di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.
8.	Firul Norma Riyanti, Sundarso, Rihandoyo	2015	Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Semarang	Kinerja Bidang Pasar Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Semarang. dilihat dari tiga fenomena kinerja organisasi yaitu responsivitas, hasil (outcome), dan manfaat (benefit). Bidang Pasar masih belum dapat mengatasi permasalahan yang ada dipasar secara cepat dari segi waktu. Pedagang dan masyarakat merasa sudah cukup nyaman dalam mengakses pasar dan juga kondisi fisik pasar di Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Namun ada beberapa kondisi fisik pasar yang belum optimal karena bekas terbakar. Organisasi pengelola pasar memiliki komiteman yang baik dalam mewujudkan tujuan dan inovasi-inovasi organisasi.

9.	Rani Nuraeni, R Didi Djadjuli	2014	Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Inpres oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang	Kurang optimalnya pengelolaan Pasar Tradisional Inpres oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang. Terlihat pada beberapa faktor seperti pada fasilitas maupun fisik bangunan yang ada dan SOP pengelolaan. Kemudian hambatan-hambatan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Inpres yaitu area parkir yang kurang memadai, sistem perawatan sanitasi/drainase yang kurang baik dan penambahan bangunan kios yang sudah ditentukan.
10.	Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe	2014	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang	Pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara aplikatif kurang optimal. Adapun hambatan pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bontang yaitu terbatasnya tenaga penyuluh, terbatasnya anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pola pikir pelaku IKM yang terkesan manja.

Mengenai penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemerintah atau instansi terkait merencanakan, merealisasikan dan mengevaluasi program/kinerja yang telah mereka sepakati untuk meningkatkan hasil produksi, penjualan, promosi, pendapatan dll dari UMKM, UKM dan pasar terkait. Sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada atau meminimalisir hasil yang jauh dari harapan. Dalam Hal ini Penulis berfokus pada

Analisis Kinerja Dinas Perdagangan Di Kabupaten Bantul di dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan bagian penting dari sebuah penelitian untuk memberikan gambaran mengenai teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. Yang mana dalam penelitian ini, harus memiliki dasar teori untuk memperkuat data dalam sebuah argumentasi. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1.6.1 Kinerja

Menurut Payaman Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat sebuah pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan sebuah perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:107) dalam Abdul halim (2009:292) kinerja menjadi hal yang penting bagi setiap terutama penilaian ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam batas waktu tertentu. Pengertian kinerja juga diungkapkan oleh Bastian dalam Hessel Nogi(2005:175) kinerja organisasi adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan beberapa indikator-indikator tertentu.

Definisi Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam waktu tertentu. Sedangkan kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam suatu organisasi. Kinerja organisasi dan kinerja pegawai memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya/pegawai yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dikerjakan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku.

Menurut Dwiyanto (2006:50-51) kinerja memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- a) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
- b) Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- c) Kualitas Layanan, menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik karena kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan.
- d) Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e) Akuntabilitas, yaitu untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kinerja organisasi dapat dilihat bahwa banyak faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi kinerja. Kinerja juga dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Soesilo (2000:22-12-22-13) bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi dimasadepan dipengaruhi oleh:

- a) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktifitas organisasi.
- b) Kebijakan pengelolaan berupa visi dan misi organisasi.

- c) Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- d) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi.

Menurut Atmosoeparto (2001:11-19) kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal sebagai berikut ini:

a) Faktor eksternal terdiri dari:

1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

b) Faktor internal terdiri dari:

1. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
3. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
4. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut kinerja adalah sebuah keberhasilan seseorang, organisasi atau sebuah instansi dalam periode tertentu di dalam melaksanakan tugas maupun fungsi-fungsinya dengan berbagai indikator yang dapat diukur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kinerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari 2 indikator yaitu secara internal dan eksternal. Sebuah kinerja menjadi hal penting yang perlu di perhatikan dalam mengukur seberapa berhasilnya pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya, contohnya kinerja suatu dinas dalam pemerintahan dapat diukur dari laporan kinerja tahunan dinas tersebut.

1.6.2 Pengelolaan

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan

pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga oranglain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Admosudirjo (2005:160) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu Admosudirjo menekankan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

- b) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut Moekijat (2000:1) pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur.

Menurut Griffin (1990: 6) manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), memimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut pengertian ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan suatu proses usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

1.7 Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini berfokus pada Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang berfokus pada pengelolaan Pasar Seni Gabusan, maka definisi konseptual penelitian ini yaitu:

1.7.1 Kinerja

Teori Kinerja yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu teori dari Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) kinerja organisasi adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan beberapa indikator-indikator tertentu.

1.7.2 Pengelolaan

Teori Pengelolaan yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu teori dari Admosudirjo (2005:160) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu Admosudirjo menekankan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan dalam memudahkan menganalisis suatu data maka diperlukan batasan-batasan yang akan diidentifikasi, hal ini bertujuan untuk menjawab sebuah masalah didalam penelitian.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang berfokus pada pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Maka terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini menurut teori dari Dwiyanto (2006:50-51) adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas
2. Responsivitas
3. Kualitas Layanan
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti melalui penelitian secara objektif. Obyek data yang bias dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari hasil naskah dan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi sehingga bisa menjadi tujuan dari penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses dan sebab dilapangan. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif agar dapat mendeskripsikan data-data dari pemerintah

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 di dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat penelitian dalam mendapatkan data-data yang akurat selain itu dalam menentukan tempat untuk melakukan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan focus serta rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 di dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Pasar Seni Gabusan.

1.9.3 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini merupakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Maka perlu adanya informasi dan data dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selaku pelaksana pembuat kebijakan dan program.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide yang di dapatkan dari hasil tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dari topik tersebut. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton (2002) menyebutnya dengan purposeful sampling, yaitu memilih kasus yang informatif (information-rich cases) berdasarkan strategi

dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi. Menurut Patton (2002) ada 16 jenis teknik pemilihan informan dengan teknik purposeful sampling dan teknik yang digunakan peneliti adalah Snowball sampling atau Chain sampling. Pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya. Metode sangat baik untuk penggunaan wawancara mendalam.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi bagaimana kinerja secara mendalam dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Manajemen PSG dan 2 pedagang di Pasar Seni Gabusan di dalam pengelolaan Pasar Seni Gabusan.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau dengan catatan yang bisa di catat dalam keadaan konsep penelitian dalam unit analisa yang bisa di jadikan objek dalam penelitian. (Rahmawati dan Dian Eka dalam Hartadi, 2017).

1.9.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

a) Data primer merupakan data yang mengenai suatu informasi maupun hal-hal yang bersangkutan dengan konsep dari penelitian yang diperlukan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber data yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut kemudian diolah kembali oleh peneliti. Data primer didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

- b) Data sekunder merupakan data tambahan dari hasil yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peneliti, seperti artikel, jurnal, peraturan pemerintah, Undang-undang. Dari data sekunder tidak perlu diolah kembali.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif. Yang mana menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009) terdapat langka-langka mengenai teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data secara langsung untuk datang ke lokasi penelitian dengan langsung melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang mana dalam pengumpulan data ini harus mencari data yang relevan untuk menentukan fokus pendalaman data.
- b) Reduksi Data, yaitu proses seleksi melalui data kasar yang belum diolah dari lapangan, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, maka hal tersebut reduksi data dimulai sejak peneliti telah memfokuskan wilayah penelitian.

- c) Penyajian Data, yaitu dilakukan dengan sekumpulan informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis berupa tabel, jaringan kerja ataupun keterkaitan kegiatan.